

MRT Jakarta Kaji Rencana Perluasan Rute hingga Tangsel

JAKARTA (IM) - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengkaji rencana perluasan rute moda raya terpadu (MRT) hingga ke Tangerang Selatan (Tangsel). Rencana perluasan itu sebelumnya pernah dibahas pada 2018 lalu.

Saat ini, jalur MRT Jakarta sepanjang 16 kilometer telah menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). MRT Jakarta memperkirakan untuk menghidupkan kembali rencana perluasan rute hingga Tangerang Selatan.

"Kami akan mulai mendorong agar rencana itu (perluasan rute hingga Tangerang Selatan) bisa dijalankan setelah semuanya selesai. Mungkin mulai awal tahun depan, saat ini kami ingin fokus pada Jakarta terlebih dahulu. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan," kata Tuhiyat se usai penandatanganan MoU PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sojitz Corporation, Rabu kemarin.

Tuhiyat menyebut rencana perluasan rute itu, tergantung pada pemerintah kota. Diketahui, Tangerang Selatan sendiri masuk provinsi Banten.

"Kami menggunakan anggaran pemerintah daerah, jadi pembangunan itu juga bergantung pada pemerintah daerahnya sendiri," tambahnya.

Tuhiyat mengaku pihaknya tidak menetapkan target kapan realisasi perluasan rute MRT Jakarta hingga Tangerang Selatan itu terwujud. Meski demikian, ia mengklaim proyek tersebut bisa diselesaikan relatif lebih cepat.

Diketahui, MRT Jakarta saat ini sedang mengerjakan konstruksi Fase 2A, yang akan menambahkan tujuh stasiun tambahan bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. MRT Jakarta telah menandatangani kesepakatan senilai Rp 4,7 triliun dengan perusahaan Jepang Sojitz Corporation untuk pembangunan fase 2A yang menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga Kota. Konstruksi fase 2A ditargetkan selesai pada akhir 2029.

Japan International Cooperation Agency (JICA) telah memberikan pinjaman bantuan pembangunan resmi untuk mendanai proyek infrastruktur Indonesia, termasuk MRT. Menurut Kementerian Keuangan pada Februari 2023, portofolio pendanaan JICA di Indonesia telah mencapai sekitar 551 miliar yen (Rp 57,8 triliun). Sekitar 227 miliar yen (Rp 23,8 triliun) dari total pendanaan tersebut disalurkan kepada Kementerian Perhubungan untuk proyek MRT. ● yan

Pemkab Bekasi Kembangkan Pesisir Utara Jadi Industri Maritim

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menindaklanjuti konsep mengembangkan perekonomian kawasan pesisir utara menjadi sektor industri maritim setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat serta provinsi.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyatakan rencana pengembangan ini didasari beberapa isu strategis yang terjadi di daerah itu antara lain kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.

"Isu lain menyangkut abrasi dan *land subsidence* pantai utara, pengembangan infrastruktur, dan penyelesaian status tanah. Pengembangan ekonomi ini sekaligus menjadi solusi menyelesaikan sejumlah isu strategis tersebut," katanya di Cikarang, Jumat (19/4).

Dia menjelaskan fenomena abrasi yang terjadi di wilayah pesisir pantai utara semakin memburuk dan menurut prediksi ahli, pada 2045 lebih dari 50 persen luas Kecamatan Muaragem-bong tergenang air laut.

Ditambah keberadaan kawasan hutan lindung yang mayoritas sudah beralih fungsi menjadi lahan tambak dan pertanian mengakibatkan potensi terjadi banjir air pasang dengan tingkat risiko tinggi.

Kondisi itu direspons pemerintah daerah setempat melalui rencana pengembangan wilayah tersebut dengan meng-*waterfront city* dan *sponge city* bernuansa lingkungan.

"Kelebihan yang didapatkan adalah wilayah ini diproyeksikan akan masuk ke dalam aglomerasi Jabodetabekpunjur mengingat pangsa pasar yang cukup besar serta peran strategis mendukung pengembangan megapolitan baik dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial," katanya.

Kawasan pesisir utara juga memiliki kedekatan secara spesial dengan ekosistem logistik Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memberikan akses luas ke negara-negara tujuan ekspor sehingga meningkatkan efisiensi industri sekaligus mem-

berikan peluang besar bagi sektor industri berorientasi ekspor.

"Kondisi saat ini di pantai utara telah banyak isu strategis yang perlu penanganan cepat. Berbagai keuntungan pun akan diraih oleh Pemkab Bekasi terutama dalam menciptakan iklim investasi di sektor industri," ucapnya.

Dikatakannya, implementasi atas gagasan yang dibangun ini akan direalisasikan dalam empat pilar Bumi Tarumanagara yakni sehat, inklusif, sejahtera, dan kolaborasi.

Selain itu ada beberapa usulan pola ruang baru di dalamnya antara lain kawasan hutan lindung, ekosistem mangrove, industri pelabuhan, rumah terbuka hijau, kawasan tanaman, perikanan budidaya, permukiman pedesaan dan perkotaan, wisata, hingga kawasan komersial serta pembangkit tenaga.

Dani mengaku telah melakukan konsultasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk merealisasikan rencana pengembangan wilayah ini sekaligus mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan konsep tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pihaknya menerima rekomendasi Kementerian Perekonomian untuk meminta dukungan penuh juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas gagasan ini. Semua sepakat untuk didorong juga sebagai usulan pelepasan hak ataupun relokasi hutan bakau dan tata ruang," katanya. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



POKEMON PLAYLAB PERTAMA DI INDONESIA

GM AKG Entertainment Christina Lim (kiri) bersama Direktur Kota Kasablanka Lusiana (kedua kiri) menghadiri pembukaan Pokemon Playlab di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (19/4). AKG Entertainment bersama The Pokemon Company menghadirkan Pokemon Playlab pertama di Indonesia dengan menyajikan berbagai pernak pernik Pokemon dan bermain kartu Pokemon berbahasa Indonesia dari 19 April - 9 Juni 2024.

Anggota DPRD Pertanyakan Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI

Saya belum tanya ke Pak Heru apakah betul ada anggaran segitu atau tidaknya. Kalaupun ada, buat pembangunan apa?, ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Ida Mahmudah.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Ida Mahmudah mempertanyakan soal besaran anggaran rencana restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sekitar Rp 22,28 miliar.

"Saya belum tanya ke Pak Heru apakah betul ada anggaran segitu atau tidaknya.

Kalaupun ada, buat pembangunan apa?" ujar Ida saat dihubungi, Jumat (19/4).

Ia belum mengetahui keberadaan anggaran tersebut meski disebut telah tercatat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta.

"Katanya ada di Citata

anggaran. Saya malah belum tahu. Saya lupa kalau ada dianggarkan di Citata," ucap Ida.

"Saya pertanyakan dulu, saya pelajari dulu di anggarannya betul atau tidak, terus peruntukkannya untuk apa," imbuh dia.

Interior dan Tambah Bangunan

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI, Heru Hermawanto mengatakan restorasi itu meliputi interior rumah hingga penambahan bangunan protokoler.

"Restorasi kan sudah direncanakan berapa tahun ya, ini mau direstorasi interior, dan eksteriornya, kemudian *landscape*, penambahan-penambahan beberapa bangunan protokoler," kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Heru mengatakan restorasi ini bukan mengembalikan bangunan seperti semula. Melainkan ada penambahan-penambahan fasilitas.

"Bukan (dikembalikan ke bangunan semula), tetapi juga ada penambahan. Ini juga kan rumah dinas Gubernur yang perlu ditambahin fasilitas, yang dulu kan, rumah itu kan rumah ya awalnya. Nah ini menjadi rumah jabatan yang perlu kebutuhan-kebutuhannya fasilitas penunjang Gubernur. Misal protokoler, kemudian macam-macam itu kan fasilitasnya kan sekarang nempel-nempel ditambahin di samping-samping nah itulah yang kita benahin," jelasnya.

"Perencanaan mau kita soundingkan ke tim mereka (TACB)" jelas Heru.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana merestorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Anggaran yang dipersiapkan Rp 22.288.355.510. Informasi ini tertuang dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) DKI Jakarta.

Dalam Sirup LKPP, tertulis bahwa penganggaran dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, dengan nama paket Pekerjaan Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta.

Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa proses tender bakal dimulai Juni 2024, sedangkan pelaksanaan proyek dilaksanakan Juli-Desember 2024. Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui rencana restorasi rumah dinas oleh Dinas Citata. Dia juga belum mendapatkan laporan terkait konsep restorasi yang akan dilaksanakan.

"Dinas Citata belum menyampaikan konsepnya ke saya. Iya itu kan bangunan cagar budaya juga, yang harus kita jaga," ujar Heru Budi di Stasiun MRT Bundaran HI, Rabu sore.

Meski begitu, Heru tak mempersoalkan rencana restorasi tersebut maupun besaran anggaran yang dipersiapkan. Sebab, perbaikan dan perawatan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta memang selalu dilakukan.

"Iya kan tiap tahun ada. Kemarin ada bocor-bocor 2023, sudah diperbaiki. Namanya aset DKI Jakarta, harus diperbaiki," kata dia. ● yan

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Daerah Lain tak Adil

JAKARTA (IM) - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Ibu Kota yang tinggal di luar daerah.

Kebijakan itu dianggap tak memberikan rasa keadilan bagi warga Jakarta lantaran warga dari daerah lain diizinkan datang ke Ibu Kota. "Ada ketidakadilan pada kebijakan penghapusan NIK warga yang tak lagi berdomisili di Jakarta, namun pendaftar baru justru tak terkontrol," ujar Dewan Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, Jumat (19/4).

Menurut Nasrullah, ada banyak warga Jakarta yang terpaksa tinggal di kota penyangga atau daerah lain karena mereka kesulitan mendapat kerja di Ibu Kota.

"Khususnya orang asli Betawi yang ngontrak di luar Jakarta karena kehidupan sehari-hari tidak di Jakarta, seperti tukang ojek, buruh toko, dan lainnya," kata Nasrullah.

Nasrullah menilai, penonaktifan NIK warga Jakarta yang tidak tinggal di Ibu Kota justru membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seolah tidak memperhatikan nasib warganya, sekalipun langkah tersebut bertujuan untuk menertibkan data kependudukan.

"Itulah yang saya katakan, program penghapusan NIK itu terasa kurang adanya keadilan dan perhatian Pemda DKI terhadap warganya," ungkap Nasrullah. "Sedangkan warga daerah setelah Lebaran datang ke Jakarta, tinggal di rumah saudaranya atau ngontrak menjadi warga Jakarta," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, tahapan penonaktifan NIK akan dilakukan pada April dari yang sebelumnya dijadwalkan awal Maret 2024.

Penundaan tahapan penonaktifan NIK warga Jakarta di luar daerah itu tidak lepas dari adanya momen kontestasi politik Pemilu 2024. Dengan demikian, proses penonaktifan NIK akan dilakukan

secara bertahap pada April 2024, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Terbaru, Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah bersurat ke Kemendagri untuk memulai tahapan penonaktifan NIK warga Ibu Kota yang tinggal di luar daerah.

Hal tersebut dilakukan karena kewenangan menonaktifkan NIK warga berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Menurut Budi, penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap, mulai dari warga yang sudah meninggal dunia. Selain itu, warga beralamat di wilayah RT yang sudah dihapus juga akan dinonaktifkan.

Berdasarkan data yang dicatatkan Budi, akan ada 92.432 warga DKI Jakarta yang NIK-nya bakal dinonaktifkan. "Yang meninggal terdampak penonaktifan NIK 81.119. Kemudian RT yang sudah tidak ada 11.374 warga," kata Budi. ● yan

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024

JAKARTA (IM) - Ada 144 kebakaran terjadi di Jakarta selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, sejak 12 Maret hingga 9 April 2024.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, mayoritas penyebab kebakaran akibat korsleting. "(Korsleting) listrik masih menjadi tertinggi sebesar 90 kejadian, gas 17 kasus, akibat (puntung) rokok enam kasus," ujar Satriadi dalam keterangannya, Jumat (19/4).

Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab kebakaran adalah membakar sampah hingga menyalakan lilin.

"(Akibat) membakar sampah tiga kejadian, (menyalakan) lilin satu kejadian, dan lainnya 27 kasus," ucap Satriadi.

Dari 144 kasus kebakaran, wilayah dengan frekuensi kejadian tertinggi ada di Jakarta Timur. Di posisi kedua yakni Jakarta Barat dengan 33 kejadian kebakaran, Jakarta Selatan 32 kasus, serta Jakarta Pusat dan Jakarta Utara 19 kasus.

Satriadi menambahkan, objek yang terbakar antara lain bangunan perumahan 46 kasus, instalasi luar gedung 36

kasus, serta bangunan umum dan perdagangan 26 kasus.

"Kemudian kendaraan 20 kejadian, lapak empat kejadian, bangunan industri dua kejadian, lalu (kebakaran) tanaman dua kejadian, sampah dua kejadian, dan lain-lain enam kejadian," ucap Satriadi.

Satriadi mengklaim ada penurunan kasus kebakaran di wilayah DKI Jakarta pada 2024 karena sosialisasi pencegahan kebakaran dilakukan secara masif.

"Untuk itu saya mengapresiasi seluruh Satuan Tugas (Satgas) Gulkarmat Kelurahan dan Kepala Sektor Gulkarmat Kecamatan yang giat melakukan sosialisasi," kata Satriadi.

Pada Ramadhan 2023, ada 154 kebakaran terjadi di Jakarta. Jumlah kerugian atas peristiwa kebakaran tersebut mencapai Rp 38,6 miliar. Jumlah wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi pada tahun 2023 ada di Jakarta Selatan, yakni mencapai 38 kasus. Posisi berikutnya yakni wilayah Jakarta Timur dengan 35 kasus, Jakarta Barat 30 kasus, Jakarta Pusat 28 kasus, dan Jakarta Utara 23 kasus. ● yan



KEBAKARAN RUKO DI MAMPANG PRAPATAN

Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan ruko Saudara Frame dan Galery yang terbakar di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat (19/4). Menurut Kapolsek Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kompol David Yunior Kanitero, menyebut tujuh korban meninggal dunia akibat kebakaran di ruko tersebut ditemukan dalam satu ruangan yang berada di lantai dua.